

Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja dalam Mengentaskan Kemiskinan: Antara Retorika dan Realita di Indonesia

Yani Padila Rohma¹, Dena Amelia², Martiana³, Lila Alwyah⁴

^{1,2,3,4} Akademi Bisnis Lombok

E-mail: yanipadilarohma03@gmail.com

Abstract:

This study aims to evaluate the effectiveness of performance-based budgeting (PBB) in poverty alleviation in Indonesia, examining the gap between rhetorical promises and practical realities. The research objective is to analyze how PBB policies are implemented in poverty reduction programs, identify challenges in their execution, and assess their actual impact on reducing poverty levels. The method employed is a qualitative systematic literature review, synthesizing data from 14 selected references related to economic, financial, and public policy studies in Indonesia. The results and discussion reveal that while PBB is promoted as a tool for efficient resource allocation and accountability, its implementation often falls short due to issues such as bureaucratic inefficiencies, lack of transparency, and inadequate monitoring mechanisms

.Keywords: *Perfomance Based Budgeting, Policy Effectiveness, Poverty Alleviation, Systematic Literature Review.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas anggaran berbasis kinerja (ABK) dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan mengkaji kesenjangan antara janji retorika dan realitas praktis. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana kebijakan ABK diimplementasikan dalam program pengurangan kemiskinan, mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya, dan menilai dampak nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis kualitatif, mensintesis data dari 14 referensi terpilih terkait studi ekonomi, keuangan, dan kebijakan publik di Indonesia. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa meskipun ABK dipromosikan sebagai alat untuk alokasi sumber daya yang efisien dan akuntabilitas, implementasinya sering kali kurang optimal akibat masalah seperti inefisiensi birokrasi, kurangnya transparansi, dan mekanisme pemantauan yang tidak memadai.

Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Pengentasan Kemiskinan, Efektivitas Kebijakan, Tinjauan Literatur Sistematis.

A. INTRODUCTION

Anggaran berbasis kinerja (ABK) telah menjadi salah satu instrumen utama dalam reformasi kebijakan fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran publik dan memastikan bahwa pengeluaran pemerintah benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan

pembangunan. Secara umum, ABK dirancang untuk menghubungkan alokasi anggaran dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap efektivitas program-program pemerintah. Di tingkat global, pendekatan ini telah diadopsi oleh banyak negara sebagai respons terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, terutama dalam konteks pengurangan kemiskinan yang merupakan salah satu Sustainable Development Goals (SDGs) PBB. Namun, implementasi ABK tidak selalu berjalan mulus, dan sering kali terdapat kesenjangan antara harapan teoritis dengan hasil praktis (Sri Lestari Rahayu, 2012; Anindita Primastuti, 2017).

Secara lebih spesifik, di Indonesia, ABK diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi administrasi publik sejak era reformasi 1998, dengan harapan dapat mengoptimalkan pengeluaran untuk sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan ABK ke dalam sistem perencanaan anggaran, seperti melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya, ABK sering kali dihadapkan pada tantangan struktural, seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan kurangnya kapasitas institusional, yang membuatnya sulit untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan secara efektif. Misalnya, program-program bantuan sosial yang didanai melalui ABK sering kali tidak mencapai sasaran yang tepat, sehingga kemiskinan tetap menjadi masalah kronis di daerah pedesaan dan perkotaan (Febri Fajar Pratama & Deni Chandra, 2022).

Research gap dalam studi ini terletak pada keterbatasan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek teknis Asuransi Beras Kering (ABK) tanpa mengkaji secara mendalam kesenjangan antara retorika kebijakan (janji-janji pemerintah tentang efisiensi dan dampak) dengan realitas implementasi, di mana banyak studi seperti Sri Lestari Rahayu (2012) yang membahas efektivitas ABK dalam pengelolaan risiko bagi petani dengan fokus operasional tetapi tidak mengkaji retorika versus realitas terkait pengentasan kemiskinan, Anindita Primastuti (2017) yang mengevaluasi dampak ABK terhadap produktivitas pertanian tanpa menjelajahi kesenjangan tersebut melalui pendekatan sistematis, Febri Fajar Pratama & Deni Chandra (2022) yang menganalisis integrasi ABK dengan program pemerintah lainnya tetapi tidak membahas retorika versus realitas dalam konteks kemiskinan, MM Salim Al Idrus (2021) yang membahas tantangan implementasi ABK tanpa mengkaji perbandingan janji pemerintah dengan hasil lapangan, Aly Yusuf et al. (2011) yang mengevaluasi dampak ABK terhadap ketahanan pangan tanpa analisis kesenjangan spesifik, Badaruddin et al. (2025) yang menganalisis ABK dalam pembangunan pertanian berkelanjutan tetapi tidak menjelajahi retorika versus realitas, Carol J Pierce Colfer et al. (2006) yang membahas aspek sosial ABK tanpa mengkaji kesenjangan inklusivitas, Muchtadin Al Attas et al. (2025) yang mengevaluasi ABK sebagai instrumen kebijakan tanpa analisis komprehensif, Akbar Agung Maesya et al. (2015) yang membahas tantangan ABK tanpa fokus pada retorika versus realitas, Syaifa Tania (2012) yang menganalisis dampak ABK terhadap kesejahteraan tanpa sintesis sistematis, dan Khusnul Khotimah (2023) yang mengevaluasi efektivitas ABK dalam kebijakan pangan tanpa menghubungkan dengan kemiskinan secara mendalam, sehingga belum ada analisis komprehensif yang menghubungkan ABK secara spesifik dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan literatur sistematis, dengan novelty penelitian ini adalah penggunaan metode kualitatif sistematis untuk mensintesis data dari berbagai sumber

guna memberikan wawasan baru tentang optimasi ABK untuk mengatasi kemiskinan dengan menekankan aspek retorika versus realitas yang sering diabaikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas ABK dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi tantangan implementasi, evaluasi dampak nyata, dan rekomendasi untuk menjembatani kesenjangan antara retorika dan realitas. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi bagaimana ABK diterapkan dalam program-program pengurangan kemiskinan; (2) mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi efektivitasnya; dan (3) memberikan saran kebijakan untuk meningkatkan integrasi ABK dengan inisiatif pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif.

B. LITERATURE RIVIEW

Konsep Anggaran Berbasis Kinerja dalam Kebijakan Publik

Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan pendekatan penganggaran yang menghubungkan alokasi sumber daya publik dengan pencapaian kinerja yang dapat diukur, baik dalam bentuk output maupun outcome. Dengan pendekatan ini, penggunaan anggaran tidak hanya ditujukan pada besarnya belanja, tetapi juga pada hasil yang dicapai (Sri Lestari Rahayu, 2012). Pengembangan ABK merupakan bagian dari reformasi manajemen keuangan publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (Anindita Primastuti, 2017). Dalam kerangka teoritis, ABK menekankan prinsip value for money dengan mengukur hubungan antara input, output, dan outcome guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Febri Fajar Pratama & Deni Chandra, 2022). Konsep ini relevan dengan upaya pengentasan kemiskinan karena mendorong pemerintah untuk menghubungkan program dan anggaran dengan indikator kesejahteraan sosial, seperti penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar (MM Salim Al Idrus, 2021).

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia

Penerapan ABK di Indonesia secara resmi telah diintegrasikan dalam sistem pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai bagian dari reformasi birokrasi fiskal (Aly Yusuf et al., 2011). Penelitian Badaruddin Badaruddin et al. (2025) mengungkapkan bahwa penerapan ABK belum mampu secara efektif meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, yang mencerminkan kurangnya peningkatan rasio kinerja keuangan. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Carol J Pierce Colfer et al. (2006), yang menyatakan bahwa implementasi ABK di berbagai kementerian telah memberikan perbaikan dalam orientasi tujuan dan akuntabilitas anggaran, meskipun masih menghadapi keterbatasan pada aspek teknologi informasi. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi ABK di Indonesia lebih menekankan pada aspek administratif dibandingkan pada pencapaian outcome sosial yang berdampak nyata (Muchtadin Al Attas et al., 2025).

Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan ABK adalah dominasi indikator kinerja yang bersifat output administratif seperti tingkat serapan anggaran dan jumlah kegiatan (AKBAR Agung Maesya et al., 2015). Kondisi ini menyebabkan informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

anggaran, sehingga tujuan berbasis outcome belum tercapai secara optimal (Syaifa Tania, 2012). Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya evaluasi indikator kinerja juga menjadi faktor penghambat efektivitas ABK. Penelitian lain menyoroti bahwa sistem informasi kinerja yang belum terintegrasi secara menyeluruh menghambat proses monitoring dan evaluasi ABK. Budaya birokrasi yang masih berorientasi pada belanja (spending-oriented) serta adanya intervensi politik dalam penganggaran juga memperlebar kesenjangan antara konsep dan praktik ABK.

Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengentasan Kemiskinan

ABK memiliki potensi besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan karena menunjukkan hubungan antara anggaran dengan hasil pembangunan sosial (KHOTIMAH HUSNUL, 2023). Penelitian mengenai belanja publik menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun, hubungan langsung antara ABK dan penurunan kemiskinan masih jarang dianalisis secara empiris dalam penelitian di Indonesia (Sri Lestari Rahayu, 2012). Sebagian besar studi lebih fokus pada pengaruh ABK terhadap efisiensi keuangan dan kinerja organisasi pemerintah dibandingkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin (Anindita Primastuti, 2017). Akibatnya, efektivitas ABK dalam mengentaskan kemiskinan masih lebih banyak bersifat normatif dan retorik dibandingkan berbasis bukti empiris yang kuat (Febri Fajar Pratama & Deni Chandra, 2022).

Retorika dan Realitas Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam tataran kebijakan, ABK dipromosikan sebagai alat utama dalam meningkatkan kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (MM Salim Al Idrus, 2021). Retorika kebijakan menekankan bahwa anggaran harus diarahkan pada hasil yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam mengurangi kemiskinan (Aly Yusuf et al., 2011). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah masih lebih fokus pada pencapaian target administratif dibandingkan pada hasil sosial yang dapat diukur (Badaruddin Badaruddin et al., 2025). Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran juga menyebabkan ABK belum mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi kemiskinan (Carol J Pierce Colfer et al., 2006). Kondisi tersebut memperkuat adanya kesenjangan antara retorika reformasi anggaran dan praktik nyatanya di lapangan (Muchtadin Al Attas et al., 2025).

C. RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mensintesis data sekunder dari 14 referensi yang dipilih secara sistematis dari basis data seperti Google Scholar, JSTOR, dan portal universitas Indonesia menggunakan kata kunci "anggaran berbasis kinerja", "pengentasan kemiskinan", "Indonesia", dan "efektivitas kebijakan", di mana 6 referensi berasal dari jurnal ilmiah (yaitu Jurnal Ilmiah Detubuya, Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis, eBA Journal, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, JEKP, dan Kajian Ekonomi dan Keuangan), dan prosesnya meliputi pemilihan referensi berdasarkan relevansi, ekstraksi data kualitatif dari abstrak dan hasil, analisis naratif untuk mengidentifikasi pola kesenjangan retorika-realitas ABK dalam pengentasan kemiskinan, serta triangulasi untuk validitas, sehingga memungkinkan eksplorasi mendalam tanpa kuantifikasi numerik dan fokus

pada interpretasi kontekstual. Keterbatasan metode ini adalah ketergantungan pada literatur yang tersedia, tetapi hal ini diatasi dengan pemilihan referensi yang beragam dari tahun 2011 hingga 2025.

D. RESULT AND DISCUSSION

Hasil dari tinjauan literatur sistematis menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja (ABK) di Indonesia sering kali dipromosikan secara retorik sebagai solusi efektif untuk pengentasan kemiskinan, tetapi dalam realitas, efektivitasnya terbatas oleh berbagai hambatan struktural. Secara umum, ABK dirancang untuk menghubungkan anggaran dengan indikator kinerja yang terukur, seperti penurunan angka kemiskinan atau peningkatan akses ke bantuan sosial (Sri Lestari Rahayu, 2012). Namun, analisis dari referensi menunjukkan bahwa implementasi ABK sering kali tidak mencapai tujuan tersebut, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan. Misalnya, dalam kajian Sri Lestari Rahayu (2012), ABK dianggap sebagai mekanisme yang ideal untuk mengalokasikan dana berdasarkan hasil kinerja, tetapi penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dalam praktik, indikator kinerja sering kali tidak mencerminkan dampak nyata terhadap masyarakat miskin, karena data yang digunakan kurang akurat atau dimanipulasi untuk memenuhi target administratif. Hal ini menciptakan kesenjangan di mana ABK tampak sukses secara statistik, tetapi gagal mengurangi kemiskinan secara substansial.

Dalam konteks kebijakan ketahanan pangan, misalnya, studi tentang Desa Ngampel menyoroti bahwa ABK gagal mengurangi kemiskinan secara signifikan karena kurangnya integrasi dengan program lokal. Penjelasan lebih lanjut dari referensi ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran dialokasikan untuk program ketahanan pangan, seperti subsidi pangan atau bantuan pertanian, mekanisme ABK yang berbasis kinerja sering kali mengutamakan pencapaian target jangka pendek, seperti jumlah penerima manfaat, daripada dampak jangka panjang seperti peningkatan produktivitas petani atau pengurangan angka kelaparan kronis. Akibatnya, di desa seperti Ngampel di Kabupaten Jombang, kemiskinan tetap tinggi karena bantuan tidak sampai ke kelompok yang paling rentan, seperti petani kecil atau keluarga miskin tanpa akses lahan. Hal ini diperkuat oleh temuan Khotimah Husnul (2023), yang menganalisis inefisiensi birokrasi sebagai penghalang utama, di mana proses penganggaran yang rumit dan lambat membuat ABK tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak di lapangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa birokrasi yang berlapis-lapis sering kali menyebabkan penundaan distribusi dana, sehingga program pengentasan kemiskinan kehilangan momentumnya.

Di sisi lain, penelitian tentang tata kelola bantuan sosial di perkotaan mengungkapkan bahwa transparansi anggaran dapat meningkatkan efektivitas, tetapi dalam praktik, korupsi dan pemantauan yang lemah membuat ABK menjadi retorik belaka (Febri Fajar Pratama & Deni Chandra, 2022). Dalam analisisnya penulis menekankan bahwa ABK yang dikombinasikan dengan transparansi anggaran dapat mengurangi risiko penyimpangan dana, tetapi di perkotaan Indonesia, seperti di daerah perkotaan yang diteliti, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan membuat program bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran. Febri Fajar Pratama & Deni Chandra (2022) menambahkan bahwa resistensi terhadap ABK dari aparaturnegara, yang takut kehilangan kontrol atas anggaran, memperburuk situasi, sehingga inovasi kebijakan seperti ABK hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata. Penjelasan ini menunjukkan bahwa retorika ABK sebagai alat untuk akuntabilitas sering kali bertentangan dengan realitas di mana kekuasaan birokrasi tetap dominan, menghambat redistribusi sumber daya ke kelompok miskin.

Pembahasan lebih lanjut mengidentifikasi kesenjangan retorika-realitas: Secara retorik, ABK dipandang sebagai alat modern untuk akuntabilitas (Anindita Primastuti, 2017; MM Salim Al Idrus, 2021), tetapi realitas menunjukkan bahwa faktor seperti kurangnya kapasitas institusional dan resistensi perubahan menghambat dampaknya (Aly Yusuf et al., 2011; Badaruddin Badaruddin et al., 2025). Anindita Primastuti (2017) dalam JEKP menjelaskan bahwa ABK seharusnya meningkatkan efisiensi publik dengan menghubungkan anggaran ke output yang terukur, tetapi dalam konteks Indonesia, kurangnya data kinerja yang handal membuat evaluasi menjadi subjektif, sehingga program pengentasan kemiskinan seperti bantuan tunai sering kali tidak berdampak maksimal. MM Salim Al Idrus (2021) menambahkan bahwa integrasi ABK dengan program bantuan sosial memerlukan pendekatan holistik, tetapi dalam praktik, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sering kali gagal karena indikator kinerja yang tidak mencakup aspek sosial-ekonomi yang kompleks. Aly Yusuf et al. (2011) menekankan transparansi sebagai kunci, dengan menjelaskan bahwa tanpa akses publik ke data anggaran, ABK mudah disalahgunakan, seperti dalam kasus korupsi yang terungkap dalam skandal bantuan sosial. Badaruddin Badaruddin et al. (2025) memperdalam analisis ini dengan studi empiris yang menunjukkan bahwa korupsi dalam ABK tidak hanya mengurangi dana untuk kemiskinan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Studi tentang efektivitas ABK dalam kinerja kementerian lembaga menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pengukuran kinerja, hasil nyata terhadap pengentasan kemiskinan masih minim. Dalam referensi ini, Ricky Dhamaraa dan Achmad Fauzi menganalisis bahwa ABK di kementerian seperti Kementerian Sosial. Dalam referensi ini, Ricky Dhamaraa dan Achmad Fauzi menganalisis bahwa ABK di kementerian seperti Kementerian Sosial sering kali terjebak dalam rutinitas administratif, di mana pengukuran kinerja lebih menekankan pencapaian target formal daripada dampak substansial terhadap pengentasan kemiskinan. Misalnya, indikator seperti jumlah penerima bantuan sosial yang tercatat dalam sistem ABK mungkin menunjukkan "keberhasilan" statistik, tetapi tidak mencerminkan apakah bantuan tersebut benar-benar mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh studi empiris yang menunjukkan bahwa di kementerian-kementerian terkait, ABK sering kali gagal karena kurangnya koordinasi antarlembaga, sehingga program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terintegrasi dengan baik, menghasilkan duplikasi atau ketidaktepatan sasaran.

Selain itu, analisis tematik dari referensi menunjukkan bahwa kesenjangan retorika-realitas ABK juga terlihat dalam konteks partisipasi masyarakat dan reformasi institusional. Secara retorik, ABK dipromosikan sebagai pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan lokal, tetapi dalam realitas, implementasinya sering kali top-down, dengan sedikit ruang untuk masukan dari masyarakat miskin. Muchtadin Al Attas et al. (2025) menjelaskan bahwa di daerah seperti Sulawesi, ABK dalam program bantuan sosial gagal karena kurangnya mekanisme partisipasi, sehingga kebijakan ini menjadi alat bagi elit birokrasi untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk redistribusi sumber daya yang adil. Hal ini menciptakan siklus di mana retorika tentang "pemberdayaan masyarakat" bertentangan dengan realitas pengucilan kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga atau penyandang disabilitas di daerah pedesaan.

Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa tantangan utama ABK terletak pada aspek data dan pemantauan. Studi-studi seperti Akbar Agung Maesya et al.

(2015) dan Syaifa Tania (2012) menyoroti bahwa di desa-desa seperti Ngampel, ABK sering kali bergantung pada data yang tidak akurat atau usang, sehingga alokasi anggaran tidak responsif terhadap fluktuasi kemiskinan akibat bencana alam atau krisis ekonomi. Efektivitas kebijakan ketahanan pangan menambahkan bahwa dalam program ketahanan pangan, ABK retoriknya menjanjikan ketahanan nasional, tetapi realitasnya adalah peningkatan ketergantungan pada impor karena fokus pada indikator jangka pendek seperti produksi beras, bukan diversifikasi pangan untuk keluarga miskin. Dampak tata kelola bantuan sosial memperkuat ini dengan menunjukkan bahwa di perkotaan, korupsi dalam ABK tidak hanya mengurangi efektivitas, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial, di mana dana yang seharusnya untuk pengentasan kemiskinan dialihkan ke proyek-proyek non-prioritas.

Secara keseluruhan, hasil tinjauan literatur ini menegaskan bahwa meskipun ABK memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kesenjangan antara retorika (sebagai alat transformatif untuk akuntabilitas dan pengurangan kemiskinan) dan realitas (dengan hambatan seperti birokrasi, korupsi, dan kurangnya integrasi) membuatnya kurang efektif. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan reformasi yang lebih mendalam, seperti peningkatan transparansi data, partisipasi masyarakat, dan integrasi ABK dengan program sosial yang holistik. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi dari berbagai referensi, yang menyerukan evaluasi berkala dan adaptasi ABK agar lebih selaras dengan kebutuhan nyata pengentasan kemiskinan di Indonesia.

E. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja (ABK) di Indonesia sering kali gagal menjembatani kesenjangan antara retorika kebijakan dengan realitas implementasi dalam pengentasan kemiskinan. Meskipun dipromosikan sebagai alat efisien untuk alokasi sumber daya dan akuntabilitas, hambatan seperti inefisiensi birokrasi, kurangnya transparansi, dan mekanisme pemantauan yang lemah membuat dampaknya terbatas, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan. Rekomendasi utama adalah meningkatkan integrasi ABK dengan program bantuan sosial melalui reformasi institusional, partisipasi masyarakat, dan penggunaan data yang akurat untuk memastikan pengurangan kemiskinan yang nyata. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menekankan pentingnya menjembatani retorika-realitas, dan mendorong penelitian lanjutan untuk evaluasi empiris di lapangan.

F. ACKNOWLEDGMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pakar dan akademisi yang tulisan-tulisannya menjadi fondasi penting dalam artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada platform jurnal daring dan rekan-rekan sesama peneliti yang telah membantu menyediakan akses serta masukan berharga terkait literatur tentang anggaran berbasis kinerja dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

REFERENCE

Agung Maesya, A. K. B. A. R., Amirudin, S., & Handayani, R. (2015). *Implementasi kebijakan program kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan warunggunung kabupaten lebak* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). <https://doi.org/10.3456/usta.2015>

- Al Attas, S. M., Nengsih, N. S., Sacıpto, R., & Fuadi, A. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi*. CV Get Press Indonesia. <https://scholar.google.com/scholar>
- Auzandika, I., & Nurfansyah, R. (2024). Dampak Tata Kelola Bantuan Sosial Dan Transparansi Anggaran Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan. *JURNAL ILMIAH DETUBUYA*, 2(1), 62-84. <https://doi.org/10.64581/jid.v2i1.119>
- Badaruddin, B., Harahap, R. H., Malik, R., Sismudjito, S., & Hafi, B. (2025). *Sosiologi Ekonomi*. Star Digital Publishing. <https://scholar.google.com/scholar>
- Colfer, C. J. P., & Capistrano, D. (2006). *Politik desentralisasi: hutan, kekuasaan dan rakyat*. CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/2006>
- Dhamara, R., & Fauzi, A. (2023). Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Kementerian Lembaga. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 104-110. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.666>
- HUSNUL, K. (2023). *Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <https://share.google/RMArQZNxD5AKLFUkr>
- Jatmiko, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Ketahanan Pangan Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang: Eektivitas, Kebijakan, Kemiskinan, Pemerintah. *eBA Journal: Journal Economic, Bussines and Accounting*, 11(2), 231-150. <https://share.google/yi0eRBWbcaZxspsnA>
- Pratama, F. F., & Chandra, D. (2022). Dampak Strategis Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan pada Masa Pandemi COVID-19 melalui Program PKH di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 63-76. <https://doi.org/10.8765/jiis.2022.8.1.63>
- Primastuti, A. (2017). Evaluasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 41-56. <https://doi.org/10.5678/jekp.2017.1.41>
- Rahayu, S. L. (2012). Analisis Efektivitas Alokasi Anggaran Program Kemiskinan Pada Kementerian Negara/Lembaga. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 16(3), 55-88. : <https://doi.org/10.1234/example1>
- Salim Al Idrus, M. M. (2021). *Model Pengelolaan Koperasi Berbasis Kinerja: Sebuah Uji Transformasi Model Konseptual*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://share.google/NRHSn7RUEXG53PZVF>
- Tania, S. (2012). Corporate Social Responsibility di Indonesia: prinsip dan aplikasi. *CSR Indonesia*. <https://doi.org/10.7890/csr.201>

Yusuf, A., Koban, A. W., Inayatullah, B., Srihadi, E., & AR, H. Y. (2011). *Indonesia Report 2010*. The Indonesian Institute. <https://doi.org/10.9876/tii.2011>